

Esai

# Krisis Ekologi Bali: Pergulatan Moralitas Lokal dalam Arus Wacana Iklim Global<sup>1</sup>

**Annette Hornbacher**

*University of Heidelberg, Germany*

Email: [annette.hornbacher@eth.uni-heidelberg.de](mailto:annette.hornbacher@eth.uni-heidelberg.de)

Pulau Bali terkenal sebagai surga tropis yang rimbun dengan tanah vulkanik yang subur, dihuni oleh para petani yang juga seniman dan pencipta ritual penuh warna, sistem irigasi yang kompleks dan lanskap sawah yang berkelanjutan secara ekologis dan sangat menakjubkan.

Keindahan kehidupan sehari-hari, pertanian dan ritual ini telah memikat banyak generasi turis dan antropolog yang menafsirkan 'tatanan yang sempurna' (Lansing 2006) dari lanskap budaya Bali sebagai perwujudan dari kosmologi yang didasarkan pada kaidah-kaidah keseimbangan dan keselarasan di antara hal-hal berseberangan, misalnya dalam membersihkan sekaligus menyuburkan aliran 'air suci' di sepanjang poros kosmos antara puncak-puncak gunung vulkanik dan laut. Begitu pentingnya air dalam praktik ritual, orang Bali biasa menyebut agama mereka sebagai agama tirtha, 'agama air suci'.

Dalam tulisan sebelumnya, saya telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kosmologis ini mewujud dalam gerakan-gerakan tarian ritual Bali dan seni persembahan (Hornbacher 2005), selain itu, prinsip-prinsip ini juga mendasari sistem persawahan dan irigasi yang kompleks di Bali.

Baru-baru ini, para pemuka agama dan antropolog berpendapat bahwa paradigma keharmonisan kosmik ini merupakan inti dari falsafah lingkungan tradisional Bali,

<sup>1</sup>Tulisan ini diterjemahkan oleh Hamzah Fansuri dengan hak cipta oleh penulis dan telah mendapat persetujuan dari penulis. Tulisan aslinya berjudul *Bali's environmental crisis: between moral ecology and global climate discourse* diterbitkan oleh *Social Anthropology/Anthropologie Sociale* (2021) 29, 1 245–248. DOI:10.1111/1469-8676.13006. *Social Anthropology* diterbitkan oleh Wiley Periodicals LLC atas nama European Association of Social Anthropologists.

*Tri Hita Karana* - tiga sumber kesejahteraan - yaitu keharmonisan dengan para dewa, tanah, dan manusia.

Namun, meskipun hal ini menunjukkan bahwa eko-filosofi Bali kuno menawarkan solusi untuk krisis ekologi global, penyelidikan menunjukkan bahwa istilah *Tri Hita Karana* (THK) yang sangat populer tersebut sebenarnya merupakan penemuan baru (Roth dan Sedana 2015), dan bagaimanapun juga, hal ini tidak melindungi Bali dari krisis ekologi yang serius terkait masalah air, mulai dari polusi yang sangat parah akibat sampah plastik di laut di sekitar Bali hingga pencemaran kimiawi dan organik pada air tawar di Bali, dan yang paling mengkhawatirkan adalah menurunnya permukaan air tanah secara dramatis akibat industri pertanian yang boros air dalam revolusi hijau serta meningkatnya kebutuhan air untuk pariwisata.

Akibatnya, tidak hanya banyak penyakit yang ditularkan melalui air, tetapi juga kekurangan air di musim kemarau, dan gagal panen yang mengancam eksistensi para petani. Faktor utama yang menyumbang masalah ini adalah pariwisata massal dan industri pertanian, tetapi juga diperparah oleh perubahan iklim global, yang membuat curah hujan musiman menjadi lebih sulit diprediksi.

Namun, apa implikasinya bagi aktivisme iklim lokal?

Sangat menarik bagi saya bahwa meskipun banyak teman bicara saya yang berasal dari Bali yang tinggal di sebuah desa di Bali selatan menyatakan bahwa perubahan iklim adalah masalah besar –terlebih lagi setelah Bali menjadi tuan rumah dari konferensi iklim PBB pada tahun 2007—namun pemikiran mereka mengenai fenomena ini sangat berbeda dengan paradigma barat yang saintifik. Banyak dari mereka menggunakan istilah perubahan iklim tersebut untuk menyebut hampir semua

konsekuensi yang mengancam dari gaya hidup konsumeris modern, yang di satu sisi mereka anggap sebagai sesuatu yang diinginkan, tetapi di sisi lain dianggap merusak cita-cita mereka akan keselarasan alam semesta. Beberapa dari mereka mengaitkan perubahan iklim dengan kerusakan lingkungan secara umum, yang disebabkan oleh keserakahan dan sifat materialis manusia, dan mereka mengutuknya sebagai gejala kegagalan untuk menjaga keseimbangan kosmik. Dari perspektif ini, perubahan iklim adalah masalah moral yang tidak dapat dihindari mengarah pada bencana kosmik di mana dunia saat ini akan musnah (*pralina*) sebagai prakondisi untuk melakukan pembaruan. Oleh karena itu, perubahan iklim diperbincangkan dalam bingkai yang saya lukiskan sebagai ekologi ‘moral’ dan bukan ekologi ‘politik’. Ini menjelaskan mengapa tsunami dahsyat yang menghantam pesisir Sumatera pada 2005 juga dikaitkan dengan perubahan iklim, layaknya meningkatnya fundamentalisme agama dan terorisme yang mengancam kerukunan antar-umat beragama di Indonesia.

Dengan kata lain, dan pada tingkat desa di mana saya melakukan sebagian besar penelitian saya, perubahan iklim tidak secara inheren terkait dengan aksi politik maupun protes, melainkan lebih pada ‘suasana krisis’ yang muncul dari kontradiksi-kontradiksi yang belum terselesaikan dari modernisasi, dan dibicarakan dalam kaitannya dengan kosmologi lokal. Hal ini bisa saja berubah di bawah pengaruh protes iklim secara global, namun sejauh ini aktivisme perubahan iklim tidak memobilisasi masyarakat Bali untuk melakukan aksi politik.

Ini tidak berarti bahwa masyarakat Bali tidak sadar akan kerusakan lingkungan: Para petani mengeluhkan penurunan air tanah yang dramatis yang diperparah oleh dampak dari perubahan iklim seperti hujan yang datang

lebih awal atau lebih lambat. Pembangunan yang merusak ini bermula pada tahun 1970-an ketika bandara internasional dibuka seiring dengan penerapan ‘revolusi hijau’ yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia. Untuk meningkatkan produksi padi, petani Bali dipaksa untuk mengadopsi varietas padi unggul terbaru yang membutuhkan lebih banyak air dibandingkan varietas lokal, dan membutuhkan pupuk kimia serta pestisida dalam jumlah yang besar. Akibatnya, bentang air dan air tanah di Bali sangat tercemar oleh bahan kimia pertanian, demikian pula dengan tubuh manusia, seperti yang ditunjukkan oleh tes pestisida dalam sampel air susu ibu. Selain itu, sungai-sungai mengering dan permukaan air tanah menurun—terkadang secara permanen terjadi di daerah-daerah pesisir yang menjadi pusat wisata dan urbanisasi karena intrusi air laut ke dalam sumur-sumur hotel yang digali terlalu dalam.

Krisis air di pulau tropis yang terkenal dengan vegetasi yang rimbun dan mata air yang suci ini sungguh mengkhawatirkan dan memicu konflik antara petani dan masyarakat Bali yang tinggal di pusat-pusat pariwisata yang mengandalkan air dari pegunungan, yang kemudian tidak tersedia untuk pertanian padi sawah.

Jadi, meskipun perubahan iklim diperbincangkan di desa-desa tempat saya melakukan penelitian, diskursus ini lebih terkait dengan kegagalan moral dalam kehidupan modern. Aktivisme lingkungan, di sisi lain, berfokus pada dampak pariwisata dan agrobisnis. Beberapa aktivis petani menganjurkan untuk kembali ke bentuk-bentuk pertanian organik: misalnya, Chakra Widia, seorang spesialis permakultur, teknik lingkungan dan pendidikan ekologi, yang mengajarkan petani lokal cara membuat kompos serta cara-cara pengendalian hama secara organik, dan melibatkan

para peserta magang dari luar negeri di berbagai programnya, seperti sekolah hijau internasional di Bali. Dia juga menginspirasi aktivisme anti-plastik yang cukup terkenal di seluruh dunia yaitu dua remaja perempuan bersaudara keturunan Bali-Belanda, Melati dan Ysabel Wijesen, yang memulai kampanye melawan plastik pada tahun 2012, menjadi pegiat lingkungan, pembicara di TED, dan pada tahun 2020 hadir dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos.

Salah satu aktivis lingkungan hidup Bali yang pertama adalah Dr Ni Luh Kartini. Sebagai seorang petani, pendukung pertanian organik untuk seluruh Bali, dan dosen pertanian di sebuah universitas, ia telah mencoba meningkatkan kesadaran petani dan politisi terkait pencemaran air selama beberapa dekade, tetapi dengan hasil yang tidak terlalu memuaskan seperti yang diharapkannya. Tekanan ekonomi pada petani masih terlalu kuat, dan pestisida yang tidak kasat mata membuat mereka tidak menyadari dampaknya bagi kesehatan mereka. Banyak di antara mereka yang rela menjual tanahnya untuk dibangun vila maupun fasilitas pariwisata, dengan harapan hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi mendatang. Dan meskipun para petani menganut falsafah *Tri Hita Karana* (keselarasan antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa) yang telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012, mereka kerap kali menjadi korban dari prinsip ‘harmoni’ yang diasosiasikan dengan dan diperalat untuk melawan mereka—contohnya, saat para politisi memaksa mereka untuk berbagi air dengan para manajer hotel yang kaya raya di wilayah pesisir atas nama ‘harmoni sosial’.

Tanah adalah satu-satunya modal bagi petani dalam ekonomi global yang mengkomodifikasi ekofilosofi Bali demi keuntungan pribadi, memaksa mereka untuk memilih antara

membayar ritual kremasi bagi orang tua, perawatan rumah sakit bagi kerabat, atau sekolah bagi anak-anak mereka—keputusan yang sering kali menyedihkan dan berdampak pada meningkatnya jumlah kasus bunuh diri di pulau dewata yang penuh dengan keharmonisan ini (Hornbacher 2013).

Karena itu, tidak heran jika protes massa yang sangat populer di Bali adalah perlawanan terhadap pengembangan pariwisata yang kemudian menjadi dikenal di bawah slogan ‘tolak reklamasi’ (*fend off the land reclamation*) untuk sebuah pulau pusat perbelanjaan dan hotel raksasa di Teluk Benoa yang bukan hanya berbenturan dengan kawasan lindung

mangrove, tetapi juga dengan pertemuan sakral sungai-sungai dalam tatanan kosmis. Aktivisme ini telah menyatukan semua segmen masyarakat Bali dalam beberapa tahun terakhir, dari para pendeta hingga kelompok-kelompok musik rock, dan mengintegrasikan tuntutan kosmologis dengan klaim dan gagasan lingkungan dalam sebuah gerakan yang mengkristal di sekitar keinginan untuk membatasi pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian juga pariwisata. Di Bali, ini adalah ide yang betul-betul mendasar, dan mungkin merupakan titik awal untuk akhirnya menganggap serius *Tri Hita Karana* tidak hanya secara ideologis tetapi juga politis.

\*\*\*

## Referensi

- Hornbacher, A. (2005). *Zuschreibung und Befremden: Postmoderne Repräsentationskrise und verkörpertes Wissen im balinesischen Tanz*. Berlin: Reimer.
- Hornbacher, A. (2013). A mood of crisis: Balinese ritual culture between creolization and criticism. In A. Horstmann & T. Reuter (Eds.), *Faith in the future: Understanding the revitalization of religions and cultural traditions in Asia* (pp. 111–140). Leiden: Brill.
- Lansing, J. S. (2006). *Perfect order: Recognizing complexity in Bali*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Roth, D., & Sedana, G. (2015). Reframing Tri Hita Karana: From “Balinese culture” to politics. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16(2), 157–175. <https://doi.org/10.1080/14442213.2014.994674>